

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian sebelumnya sebagai dasar pertimbangan jika relevan dengan subjek penelitian saat ini. Dalam hal ini, pembelajaran ide kinematika abstrak didukung oleh partisipasi aktif mahasiswa melalui pengalaman praktis, kerja sama tim, dan integrasi seni. Pendekatan ini relevan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berperan sebagai sumber inspirasi yang dapat membantu peneliti dalam merancang penelitian serta memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah penyusunan penelitian secara sistematis, baik dari sudut pandang teori maupun konsep. Hasil dari penelitian sebelumnya menjadi acuan dasar saat melakukan penelitian. Hal ini disebabkan karena penelitian sebelumnya berguna untuk memahami dan mendalami teori yang akan digunakan dalam penelitian. Peneliti menemukan studi-studi penting lain yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Meskipun topik ini memiliki beberapa keterkaitan, penelitian ini menekankan perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah studi-studi sebelumnya yang digunakan peneliti:

Gunawan Asropin & Muhammad Farid M (2020) melakukan penelitian tentang pemerintahan kolaboratif dalam merespons keluhan masyarakat mengenai lalu lintas, dengan fokus pada Kota Surabaya. Kepolisian Kota Surabaya, masyarakat, dan Radio Suara Surabaya berpartisipasi dalam studi ini. Berdasarkan studi sebelumnya, metode kerja sama ini berkaitan dengan tiga elemen kunci: komunikasi tatap muka, membangun kepercayaan, dan komitmen terhadap proses. Meskipun waktu pertemuan tidak ditentukan secara pasti, Radio Suara Surabaya dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Surabaya secara rutin bertemu untuk melakukan dialog tatap muka. Membangun

reputasi masing-masing pihak dan membina kolaborasi serta komunikasi yang erat di antara para pemangku kepentingan merupakan langkah awal dalam membangun kepercayaan. *Commitmen to The Process* dilakukan melalui forum formal dan semi formal yang bertujuan membangun kepercayaan dan membicarakan perkembangan kerja sama, meskipun tidak menghasilkan perjanjian tertulis. Proses ini berakhir dengan pencapaian kesepakatan bersama dan hasil sementara. Penelitian ini sendiri berfokus pada tata kelola pemerintahan bersama bermodel hexa-helix dalam pengelolaan Gedung MCC Kota Malang sebagai pusat ekonomi kreatif.

Sri Lisa Ningsi, dkk. (2021) “Strategi *Collaborative Governance* Pada Program Ekonomi Kreatif yang Berdampak pada Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Kota Palembang”. Penelitian ini menyajikan strategi kerja sama antara pemerintah dengan pihak masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Metode ini memfasilitasi pemahaman tentang konsep kinematika yang sulit dipahami melalui pengalaman langsung, kerjasama, serta penggabungan seni. Strategi ini relevan dengan dasar hukum dan keadaan rendah kemampuan para pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Penelitian ini juga mengacu pada teori Ansell & Gash, di mana pemerintah melakukan dialog langsung dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, organisasi seperti Litbang Bappeda, Kementerian Pariwisata, Koperasi, Kementerian UMKM, dan Kementerian Kebudayaan Palembang. Mereka berfungsi sebagai pengatur produksi, tim teknis, atau institusi pendidikan seperti Universitas Palembang, yang berpartisipasi dalam kerja sama antara pemerintah dan sektor kreatif. Komitmen dalam proses ini dilakukan dengan pengembangan ruang publik baru, seperti memanfaatkan Pedestrian Sudirman dan Kenten Street sebagai tempat berkomunikasi dan berkarya bagi komunitas kreatif. Namun, dalam penelitian ini, lingkup kolaborasi antara pemerintah dan hexahelix masih terbatas hanya pada pengelolaan di Gedung MCC Kota Malang.

Afifah Rainma R. & Kurnia Nur F. (2023) “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kulon Progo”. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang membantu dan menghambat dalam Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

Proses kerja sama bisa berjalan baik jika ada sumber daya manusia yang memadai, tetapi bisa terhambat jika komitmen para pelaku UMKM rendah. Penelitian ini menggunakan teori yang diusulkan oleh Ansell dan Gash, yang meliputi kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan yang mendukung, serta proses kolaborasi. Dalam kondisi awal, masalah utama yang mendorong terjadinya *collaborative governance* adalah perbedaan kepemilikan sumber daya dan insentif untuk ikut serta. Perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dapat dipahami sebagai perbedaan dalam kekuatan dan pengaruh antara pihak-pihak yang terlibat. Kekuatan terbesar dimiliki oleh pemerintah sebagai stakeholder yang membuat kebijakan, program, dan menyediakan dana. Sementara itu, aktor swasta dan masyarakat memiliki sumber daya untuk membantu dalam teknologi dan promosi, baik secara *offline* maupun *online*. Pada desain kelembagaan, aturan dan batasan diatur melalui perjanjian kerjasama MoU antara Alfamart atau Indomaret dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta Peraturan Daerah tentang produk AirKU. Kepemimpinan fasilitatif telah diwujudkan oleh Bupati Kabupaten Kulon Progo saat menjabat tahun 2011 hingga 2019, di mana kepercayaan dibangun oleh setiap pemimpin *stakeholder* dengan cara memberikan instruksi yang konsisten dan jelas. Selain itu, komitmen terhadap akuntabilitas bisa dilihat dari komitmen para pemimpin stakeholder dalam merancang kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang berkelanjutan. Penelitian ini lebih fokus pada kebijakan yang tepat dalam kerja sama pemerintah dengan hexahelix untuk mengembangkan pengelolaan gedung MCC Kota Malang yang sebelumnya belum optimal digunakan.

Studi yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Elsa Trisniati Juliannes C. dkk. berjudul "*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus". Penelitian ini berfokus pada penerapan tata kelola kolaboratif dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Beberapa indikator yang diterapkan dalam penelitian ini termasuk kondisi awal, desain organisasi, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Penelitian ini didasarkan pada teori tata kelola kolaboratif yang diusulkan oleh Ansell dan Gash. KEK Tanjung Lesung masih memiliki sumber daya yang tidak terdistribusi. Sebagai sektor swasta dan organisasi

pengendali Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, PT Banten West Java memiliki sumber daya seperti keuangan dan penguasaan lahan. Karena peran masing-masing pemangku kepentingan dalam perancangan kelembagaan terbatas, partisipasi pemangku kepentingan dalam kolaborasi masih kurang. Kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah mengakibatkan pemerintah masih menghadapi masalah dalam kepemimpinan fasilitatif, yang seharusnya berperan sebagai penghubung komunikasi di antara pemangku kepentingan. Karena pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan dan sektor swasta sebagai pengelola, rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung disusun melalui proses kolaboratif. Meskipun demikian, publik, media, dan akademisi turut berpartisipasi dalam proses kolaboratif implementasinya. Untuk mendukung pembangunan dan optimalisasi Gedung MCC di Kota Malang, studi ini juga menekankan kerja sama pemerintah dengan para pemangku kepentingan hexa-helix.

Hendra Irawan dan Nurliah Nurdin (2022) melakukan penelitian tentang kolaborasi pemerintah dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian ini berlandaskan teori Ansell dan Gash yang terdiri dari beberapa elemen. Elemen pertama adalah situasi awal yang memicu terjadinya banjir, yaitu ketiadaan tanggul dan tingginya peningkatan permukaan dasar sungai. Komponen kedua adalah desain kelembagaan di Kabupaten Kepulauan Sula, yang melibatkan pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, serta pemuda yang membantu setelah bencana terjadi. Beberapa organisasi yang berpartisipasi adalah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Solidaritas Fina Sua (SOFIA), Aliansi Pemuda Sula (APS), Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gema Rakyat), serta Persatuan Pemuda Kepulauan Sula (SEKEPAL) semuanya langsung datang ke lokasi bencana. Fungsi lembaga yang menangani masalah banjir adalah memfasilitasi komunikasi antara sektor publik dan swasta, akademisi, dan masyarakat. Hal ini dikenal sebagai kepemimpinan fasilitatif. Ada tiga fase dalam proses kerja sama ini: prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Namun, karena akademisi dan lembaga belum terlibat, proses ini belum berjalan optimal. Selain itu, upaya mitigasi banjir terhambat

oleh minimnya dana dan peralatan. Minimnya alat berat, seperti ekskavator, untuk normalisasi dan minimnya anggaran pembangunan tanggul merupakan contoh nyata. Fokus utama studi ini adalah kerja sama pemerintah dalam mengelola pembangunan Gedung MCC di Kota Malang dengan menerapkan konsep heksaheliks, meskipun dalam konteks yang disederhanakan.

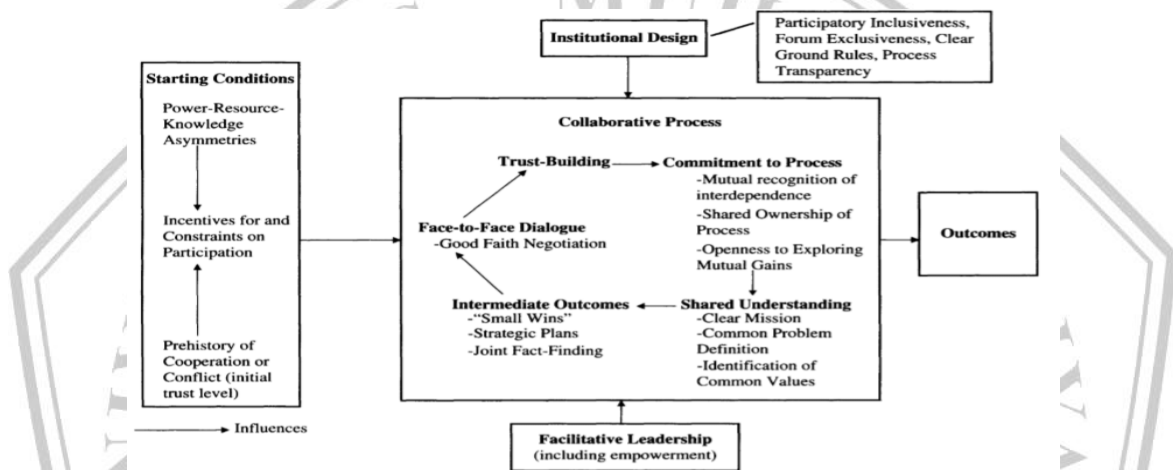
2.2 Kerangka Teori

2.2.1. Teori Tata Kelola Kolaborasi

Menurut konsep tata kelola kolaboratif, yang dikembangkan pada tahun 2008 oleh Chris Ansell dan Alison Gash, organisasi yang bekerja sama satu atau lebih lembaga pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengambil keputusan. Prosedur ini bersifat formal, berdasarkan diskusi, dan mengutamakan kesepakatan bersama. Selain mengelola program dan sumber daya milik negara, tujuannya adalah untuk menciptakan atau melaksanakan kebijakan publik.

Menurut Ansell & Gash, seperti yang dikemukakan oleh Sudarmo (2011), lebih jelas lagi. Mereka menyatakan bahwa *collaborative governance* muncul karena beberapa alasan dan dinilai penting. Berdasarkan alasan tersebut, *collaborative governance* dibuat secara sengaja dan sadar, yaitu: (a) ikatan antar organisasi yang rumit dan saling tergantung; (b) adanya perselisihan kepentingan di antara kelompok yang sulit diselesaikan karena sudah menjadi bagian dari kehidupan; (c) penggunaan solusi baru untuk memperkuat legitimasi politik; (d) kegagalan dalam pelaksanaan program di lapangan; (e) kurangnya kemampuan beberapa kelompok karena adanya pemisahan kekuasaan dalam organisasi lain, yang menghambat pengambilan keputusan; (f) meningkatnya mobilisasi sebagai bentuk pengorganisasian kelompok; serta (g) adanya anggaran yang besar dan campur tangan politik dalam perencanaan kebijakan. Ansell dan Gash (2008) tata kelola kolaboratif adalah proses di mana satu atau lebih organisasi pemerintah dan non-pemerintah bekerja sama untuk membuat keputusan tentang pelaksanaan kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya publik.

Kolaborasi antara satu atau lebih lembaga pemerintah dan kelompok non-pemerintah disebut tata kelola kolaboratif (Ansell & Gash, 2008). Tujuannya adalah mengelola sumber daya publik dan menerapkan kebijakan publik. Selain itu, Ansell dan Gash (2008) mengembangkan model tata kelola kolaboratif dengan empat variabel utama: kepemimpinan, prosedur kolaborasi, desain kelembagaan, dan kondisi awal. Gambar 2 menunjukkan bagaimana keempat variabel ini dipecah lebih lanjut menjadi beberapa subvariabel:



Gambar 2. 1 Model Manajemen Kolaboratif oleh Ansell & Gash

Sumber: Ansell & Gash (2008)

Praktek kolaborasi dijalankan melalui beberapa susunan, Ansell & Grash (2008, h.558 - 561) sebagaimana kolaborasi diawali dengan pembentukan kepercayaan antara para aktor yang terlibat. Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi, komunikasi yang terbuka, serta komitmen untuk memenuhi kesepakatan yang ada. Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendukung inisiatif MCC, sektor swasta harus memastikan bahwa investasi mereka memberi manfaat yang seimbang, dan masyarakat serta pelaku industri kreatif perlu merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses keputusan.

Perlu diikuti dengan adanya sebuah komitmen semua pihak sangat penting dalam keberhasilan MCC. Pemerintah harus berkomitmen untuk menyediakan dana atau kebijakan yang mendukung MCC, sementara sektor swasta harus berkomitmen untuk

menyediakan fasilitas atau teknologi yang diperlukan. Pelaku industri kreatif juga harus berkomitmen untuk aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengembangan program-program di MCC. Seperti halnya pelaku industri kreatif yang menggunakan fasilitas MCC perlu menunjukkan komitmen untuk berkolaborasi dan berinovasi bersama para pihak lain, baik dalam pengembangan produk kreatif maupun dalam penciptaan nilai ekonomi dari kolaborasi tersebut.

Diikuti dengan pemahaman-pemahaman bersama antar para hexahelix mengenai identifikasi masalah- masalah yang mungkin terjadi dan peningkatan value bersama. Sehingga dengan berjalannya waktu, mulai muncul sebuah keberhasilan - keberhasilan kecil dan perencanaan strategis kedepannya dan berakhir dengan negosiasi yang baik antara pemerintah dengan beberapa hexahelix lainnya.

2.2.2. Tata Kelola Pemerintah (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan, yang umumnya dikenal dengan istilah "*Good Governance*", merujuk pada cara yang baik dan efektif dalam mengelola urusan dan sumber daya milik masyarakat. Bank Dunia dan OECF, menurut Rahardjo Adisasmitha (2011:23), mengaitkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan implementasi manajemen pembangunan yang kuat dan akuntabel yang mendukung pasar yang efektif dan demokrasi serta menghentikan korupsi di bidang politik dan administratif. Selain itu, penerapan pengendalian fiskal dan penciptaan kerangka kerja politik dan hukum yang mendorong pertumbuhan kewirausahaan juga merupakan komponen tata kelola yang efektif. UNDP menjelaskan beberapa ciri dari *good governance*, yaitu partisipasi masyarakat, penerapan hukum, transparansi, responsif, orientasi pada kesepakatan bersama, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta memiliki visi strategis. Tujuan dari *good governance* adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.